

---

## FUNGSI KOMUNIKASI LINTAS BUDAYA DALAM KONFLIK AGAMA MASYARAKAT PERBATASAN ACEH

Muji Mulia<sup>1</sup>, Muhajir Al-Fairusy<sup>2\*</sup>, Zulfatmi<sup>3</sup>, Zakki Fuad Khalil<sup>4</sup>

<sup>1,3,4</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Meulaboh

\*Korespondensi: [muhajiralfairusy@staindirundeng.ac.id](mailto:muhajiralfairusy@staindirundeng.ac.id)

**Abstract:** This study discussed socio-religious events at the Aceh border. The border is defined as the boundary line between Aceh which uphold Islam as its identity with the neighboring province which has multiculturalism as its identity. The border is a melting pot for various ethnic and religious groups which formed their distinctive identity. Cross-cultural communication is become necessary to reduce religious conflict that has emerged for a long time. This study asks this question: why cross-cultural communication is important for Acehnese border communities. This study used a qualitative method with an ethnographic approach to understanding the identity awareness of people who have diverse identities. Strengthening cross-cultural communication can be categorized as a form of social engineering in the context of the integration of Acehnese border communities. The study showed that religious conflicts on the Aceh border, especially at the Singkil Regency, which have occurred since 1979 and peaked in 2015 were triggered by the state of identity politics. Religious theological nuances were massively involved in the conflict and contestation, this attitude showed the legitimacy of political interests. Historically, the people of Singkil came from one ancestor with the same clan. Community integration can only be done through culture-based communication as the glue of social relations. Cross-cultural forms of communication could be found in public spaces such as traditional markets and local community weddings.

**Keywords:** The Function, Cross-Cultural Communication, The Aceh's Border Communities

**Abstrak:** Studi ini mendiskusikan peristiwa sosial keagamaan di perbatasan (border) Aceh. Perbatasan mengandung makna garis batas, antara Aceh yang menjunjung Islam sebagai identitas dengan provinsi tetangga yang multikultur. Kawasan ini menjadi titik pertemuan ragam etnis dan agama yang membentuk identitas tersendiri. Komunikasi lintas budaya dalam rangka meredam konflik agama yang telah lama muncul menjadi keniscayaan. Studi ini beranjak dari pertanyaan mengapa komunikasi lintas budaya penting bagi masyarakat perbatasan Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi untuk memahami kesadaran identitas masyarakat yang memiliki identitas beragam. Penguatan komunikasi lintas budaya dapat dikategorikan sebagai bentuk rekayasa sosial dalam konteks integrasi masyarakat perbatasan Aceh. Hasil penelitian menunjukkan jika konflik agama di perbatasan Aceh, khususnya Kabupaten Singkil yang terjadi sejak tahun 1979 dan puncaknya pada tahun 2015 dipicu oleh keadaan politik identitas. Nuansa teologis keagamaan dilibatkan secara masif dalam konflik dan kontestasi tersebut, sikap ini menunjukkan adanya legitimasi kepentingan yang bersifat politis. Realitas sejarah, masyarakat Singkil berasal dari satu nenek moyang dengan marga yang sama. Integrasi masyarakat hanya bisa dilakukan melalui komunikasi berbasis budaya sebagai perekat hubungan sosial. Bentuk komunikasi lintas budaya dapat ditemui di ruang publik seperti pasar tradisional dan acara pesta perkawinan masyarakat setempat.

**Kata Kunci:** Fungsi, Komunikasi Lintas Budaya, Masyarakat Perbatasan Aceh.

## A. Pendahuluan

Konflik antar umat beragama masih kerap menghiasi diskursus hubungan antar pemeluk agama di Indonesia. Dalam tingkatan tertentu, ketegangan sosial yang berujung konflik terjadi antar pemeluk agama di Indonesia, khususnya antara golongan Islam dengan Kristen, misalnya konflik di Ujung Pandang tahun 1967 dan tahun 1969, Jati Barang (Jawa Barat) tahun 1968, Slipi (Jakarta) tahun 1969, Simpang Kanan (Aceh) tahun 1979, Purwakarta tahun 1979, Bunia (Nusa Tenggara Barat) tahun 1979, Ambon tahun 1998, dan di Kupang tahun 1999. Bunia (Nusa Tenggara Barat) tahun 1979, Ambon tahun 1998, Kupang tahun 1999, masalah HKBP di Sumatera Utara, Maluku, Situbondo hingga kejadian Tasikmalaya dan lain- lain (Said Agil Husin Al Munawwar, 2005).

Dalam konteks Indonesia, faktor- faktor disharmoni di atas perlu ditelaah dalam kaitan dengan relasi umat beragama di Indonesia. Hal ini didasari kerangka berfikir bahwa salah satu langkah untuk meredam konflik adalah mengetahui sumber-sumber konflik itu sendiri. Selain itu, paradigma yang harus dibangun adalah berbasis pada budaya masyarakat Indonesia sendiri dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Sejalan dengan itu, diperlukan dukungan yang kuat dari pemerintah untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama di negeri ini. Dukungan yang dimaksud bukanlah dalam bentuk campur tangan pemerintah terhadap persoalan internalisasi keyakinan agama melainkan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya dan berinteraksi sosial yang dilandasi oleh kejujuran dan saling pengertian.

Berkembangnya pandangan tentang saling berkaitnya nilai- nilai agama dengan sederet masalah menyangkut kemaslahatan umum, maka sosiolog seperti Robert Bellah, tidak saja melihat peran penting agama dalam kehidupan sosial-politik tapi juga menilai bahwa agama bukan persoalan pribadi (*private*), tetapi justru menjadi persoalan publik dan harus ada peran pemerintah untuk mengaturnya. Agama adalah sesuatu yang seharusnya *deprivatized* (Bachtiar Effendy, 2001; Robert N Bellah *Beyond Belief*, 1994). Secara teologis maupun

sosiologis agama dapat dipandang sebagai instrument untuk memahami dunia. Secara teologis, lebih-lebih Islam, hal itu dikarenakan oleh watak *omnipresent* agama. Artinya bahwa agama, baik melalui simbol-simbol maupun nilai-nilai yang dikandungnya “hadir di mana-mana” ikut mempengaruhi dan bahkan membentuk struktur sosial, budaya, ekonomi dan politik serta kebijakan publik (James Norman Dalrymple Anderson, 1991).

Di Aceh, provinsi dengan identitas Syariat Islam juga pernah terjadi kasus konflik antar umat beragama, terutama di kawasan perbatasan Aceh, khususnya Singkil. Konflik agama di Singkil telah muncul sejak tahun 1979. Konflik dipicu oleh persoalan pendirian rumah peribadatan yang dianggap melanggar aturan, sehingga mengusik dan menimbulkan kemarahan umat Islam yang berujung pada konflik antar umat beragama. Puncak konflik terjadi pada pertengahan Agustus 2015 yang lalu, dimana salah satu tempat ibadah umat Kristen di daerah Suka Makmur dibakar. Kericuhan antara muslim dan umat Kristen tersebut dipicu oleh persoalan hukum dan “pembenturan” kalangan tertentu terhadap kearifan regulasi yang ada di Aceh (Fairusy, n.d.)

Ditelusuri dari berbagai studi, banyak faktor yang mempengaruhi munculnya berbagai konflik atas nama agama dan suku di tengah masyarakat. Berdasar hasil survei dari Badan litbang dan Diklat Kementerian Agama tentang kerukunan antar umat pada tahun 2020, menyebutkan bahwa ada empat permasalahan utama yang menjadi pemicu kerukunan umat beragama: (1) Prasangka Antar Kelompok (2) Toleransi (3) Kesejahteraan (4) Kerjasama. Namun yang paling terendah berdasarkan survei tersebut adalah masalah toleransi.

Hulu dari permasalahan kerukunan umat beragama secara realitas berkaitan dengan “hubungan komunikasi”. Menurut Rosyid dalam sebuah penelitiannya menyebutkan bahwa salah satu kunci dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan serta juga jalan keluar dari berbagai konflik agama yaitu dengan meningkatkan kualitas interaksi, reaksi, dan komunikasi antar warga yang berlatar belakang berbeda dari berbagai aspek kehidupan, termasuk yang paling penting yaitu aspek agama (Rosyid, 2014).

Beranjak dari uraian tersebut, studi ini mengajukan pertanyaan utama, mengapa komunikasi lintas budaya penting pada komunitas masyarakat lintas agama di Singkil, terutama pasca konflik agama tahun 2015. Studi ini bertujuan memahami fungsi komunikasi berbasis budaya masyarakat lintas agama di Kabupaten Aceh Singkil, terutama beberapa kecamatan yang dianggap menjadi titik konflik. Studi ini juga berusaha memahami persoalan pola hubungan masyarakat multi agama, mengingat peristiwa ini tidak pernah sepi dari peristiwa-peristiwa yang muncul dimana hal tersebut belum ada sebelumnya (Ruslan, 2017).

## **B. Kerangka Teori**

Konflik merupakan akar permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat yang bertolak belakang dengan pengertian perdamaian dan kerukunan (Hendropuspito, 1984). Konflik yang disebutkan oleh Rauf sejalan dengan pengertian konflik yang digunakan secara luas lembaga seperti The British Council yang menyebut konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Maswadi Rauf, 2000).

Menurut Dean G. Pruit dan Jeffrey Z. Rubin dengan mengangkat pendapat Webster bahwa istilah "*conflict*" di dalam bahasa lokalnya berarti suatu perkelahian, peperangan atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Pengertian tersebut mengalami perkembangan sehingga menyentuh aspek psikologi sehingga konflik berarti persepsi mengenai kepentingan (Pruit Dean, 2004). Bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok, karena mereka yang terlibat memiliki perbedaan sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan.

Sebagai sebuah ajaran, agama memuat suatu perangkat pola-pola kelakuan yang harus dilakukan oleh para penganutnya. Pola kelakuan yang di harapkan adalah terlaksananya pola yang bersifat ideal, di mana masyarakat dapat hidup berdampingan antara satu dengan yang lain, tidak terbatas pada antar sesama pemeluknya, tetapi juga harus hidup berdampingan dengan pemeluk-pemeluk agama lainnya (Pruit Dean, 2004).

Berbagai buku tentang pembahasan sosial dan agama cukup banyak di tulis, baik oleh sarjana Barat maupun sarjana Timur di antaranya adalah Max Weber dan Ernst Troeltsch. Weber terkenal dengan tesisnya mengenai peranan sekte-sekte protestan dalam perkembangan semangat kapitalisme di Eropa, dan dengan teorinya mengenai kepemimpinan karismatik. Aliran yang di bawa Weber adanya penekanan pada konsep rationalization, dalam analisisnya menghubungkan antara agama dan perilaku ekonomi, sehingga ia menyimpulkan bahwa agama-agama di Timur tidak rasional (Paul Rosyadi, 1986).

Di samping itu Andrew M. Greeley menulis tentang agama suatu teori sekuler, ia membantah bahwa otoritas tertinggi ada pada gereja atau masjid. Di tambahkan pula bahwa jikapun kita menemukan, itu hanya merupakan agama turunan (Abdul Djamal Soamole, 1982). Syamsuddin Abdullah mencoba untuk melihat bagaimana hubungan agama dalam kehidupan masyarakat, ia mengaitkan agama dengan struktur lembaga-lembaga kemasyarakatan dan pola-pola yang sudah mapan dari tingkah laku dan hubungan-hubungan serta kepentingan yang sudah stabil. Di sisi lain Emile Durkheim melihat bahwa representasi-representasi agama bersifat konstitutif bagi masyarakat (Syamsuddin Abdullah., 1997).

Representasi yang di maksudkan Durkheim adalah hakikat agama ada dalam pikiran individu masing-masing, sehingga menanamkan dorongan egosenteris terhadap diri individu, sehingga ia bisa berhadapan dengan realitas eksternal. Representasi bersama itulah, dengan kemampuan mengarahkan dan mengedalikan motivasi pribadi, yang membuat masyarakat terwujud (Robert N. Bellah., 2000). Durkheim benar-benar memperlihatkan dengan jelas arti penting dari tindakan religius untuk merangsang individu-individu agar berpartisipasi secara positif dalam kehidupan sosial. Teori Durkheim ini sangat berbeda dengan gagasan yang dikemukakan Karl Marx, ia menilai bahwa agama adalah candu bagi masyarakat (Rex, 1997).

Pada zaman modern ini, orang dengan berbagai aktivitas dan kepentingan silih berganti, kadang dapat membuat seorang individu atau suatu kelompok mengalami disjungsi atau persinggungan dengan individu atau kelompok yang lain yang akan mengakibatkan konflik. Konflik yang berkepanjangan kadang dapat

memperburuk tatanan sosial masyarakat. Namun, konflik juga berperan positif dalam memperkuat persatuan dan menghilangkan konflik intern dalam suatu kelompok. Konflik dimanapun bentuknya merupakan sesuatu yang wajar terjadi. Konflik senantiasa ada dalam setiap sistem sosial. Dapat dikatakan konflik merupakan merupakan suatu ciri dari sistem sosial. Tanpa konflik suatu hubungan tidak akan hidup. Sedangkan ketiadaan konflik dapat menandakan terjadinya penekanan masalah yang suatu saat nanti akan timbul suatu ledakan yang benar-benar kacau.

Sari dalam pandangannya menyikapai konflik yang berkaitan dengan perbedaan identitas menurut sudut pandang kelompok ahli (Ramadhanita Mustika Sari, 2011), yaitu: *Pertama*, pandangan primordialis, yaitu perbedaan-perbedaan genetika seperti suku, ras, dan agama menjadi sumber utama dari sebuah gesekan-gesekan antar kelompok genetik yang mempunyai tujuan-tujuan yang diharapkan dengan kepentingan-kepentingan yang ada di dalamnya, sehingga pada akhirnya terjadi sebuah benturan-benturan yang tidak dapat dihindarkan dengan keinginan untuk tetap eksis dalam diri kelompok itu sendiri. Perbedaan perspektifnya adalah ketika suatu kelompok merasa dirugikan oleh kelompok lain, maka hal itu menjadi penentu terjadinya sebuah konflik.

*Kedua*, pandangan kaum instrumentalis, yaitu suku, agama dan identitas lainnya merupakan sebuah media untuk mencapai tujuan yang diinginkan, secara material maupun non-material, sehingga segala bentuk keinginan dan tujuan baik individu atau kelompok dalam hal ini merupakan sebuah keharusan untuk menjadikan diskursus yang terus dikembangkan dan ditingkatkan sebagai pemenuhan terhadap capaian yang diharapkan. Oleh karena itu, ketika kelompok dengan tujuan yang diinginkan, maka gesekan dari setiap keinginan kelompok itu menjadi sebuah kewajiban yang harus terus dilakukan.

*Ketiga*, kaum konstruktivis, yaitu beranggapan bahwa identitas kelompok tidak bersifat kaku, etnisitas bagi kelompok ini dapat diolah hingga membentuk jaringan relasi pergaulan sosial. Kelompok ini berpandangan bahwa semua kelompok etnis dalam suatu masyarakat adalah sebagai konektivitas untuk mencapai tujuan secara bersama dengan konsep jaringan yang dibangun dengan

sistem kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain, serta saling membutuhkan dalam berbagai kegiatan. Sehingga capaian tujuan dari suatu kelompok akan membantu tujuan dari kelompok yang lainnya.

Lalu, apa pentingnya komunikasi lintas budaya bagi penyelesaian konflik. Secara pengertian komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Communication* dan kalimat ini di adopsi dari kata Latin "*communicatio*", yang berasal dari kata "*communis*" yang memiliki sebuah pengertian yaitu "bersama". Kata sama yang dimaksud yaitu berujung pada pengertian sama makna. Secara proses komunikasi menjelaskan tentang "siapa", mengatakan "apa", "dengan saluran apa", "kepada siapa", dan "dengan akibat atau hasil apa" (*Who?, Says what? In which channel? To whom? With what effect*) dan ini salah satu teori dasar komunikasi yang dikemukakan oleh ilmuwan komunikasi yaitu Lasswel. Menurut beberapa ahli komunikasi seperti Hovland, Janis dan Kelly komunikasi adalah suatu proses dimana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah, membentuk perilaku orang lain (komunikan/khalayak). Demikian menurut Onong Uchjana Efendy 2005, komunikasi adalah sebuah proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain (Kurniawan D., 2018).

Namun seiring berjalanya waktu perkembangan kajian komunikasi bukan sekedar pada konsep atau teori diatas. Kajian ilmu komunikasi kian dinamis seiring dengan masalah yang timbul dari komunikasi yang kemudian memunculkan pengertian yang luas sesuai dengan arah peradaban manusia (Alatas, 2014). Sebagai contoh peran kajian komunikasi dibidang *Public Relation* atau Humas, dimana sebelum derasnya arus sosial media seperti saat ini kajian Humas berfokus pada pembangunan citra kepada masyarakat langsung atau menggunakan media masa pers. Namun saat ini Humas memiliki kajian baru tentang bagaimana kekuatan pembangunan citra melalui media sosial seperti *Facebook*, *Intagram*, dan sebagainya. Hal ini bisa dilihat hampir semua perusahaan membangun citra melalui media sosial dengan akun sosial medianya yang ramai dengan unggahan.

Di sisi lain juga kajian-kajian komunikasi seperti lintas agama atau lintas budaya juga kian mengikuti perkembangan. Berbagai kajian juga hadir tentang bagaimana komunikasi lintas budaya ataupun agama yang sebelumnya berada dalam ruang nyata namun kini harus bergelut pada ruang digital. Seperti pada penelitian Yahya dan Mahmudah (2019) yang berjudul *Echo Chambers* di Dunia Maya: Tantangan Baru Komunikasi Antar Umat Beragama. Jurnal yang bercerita tentang pesatnya era globalisasi dengan kemajuan internet dan dunia maya. Dimana justru menimbulkan kekwatiran baru dimana mampu menembus berbagai batasan ruang dan waktu dimana membuat manusia menjadi lebih terbuka, inklusif, bahkan multikulturalisme. Walhasil, inilah yang membuat beberapa kajian komunikasi budaya berubah secara signifikan dengan ruang baru yang disebut virtual.

Ruang yang disebut virtual inilah yang seolah menjadi babak baru dalam kehidupan era modernisasi ini. Segala sesuatu bisa memungkinkan terjadi dalam dunia digital akibat dari keterbukaan yang diberikan hingga mampu menembus beberapa ruang yang sebenarnya privasi bagi setiap individu maupun kelompok dan ini sangat rentan terjadinya konflik. Berdasarkan *status quo* Indonesia sebagai negara dengan berbagai suku dan agama (plurisme) membuat gesekan isu SARA sangat subur di ruang digital terutama sosial media Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (KOMINFO RI) mencatat sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 setidaknya telah menangani 3.640 kasus ujaran kebencian berbasis SARA di ruang digital (lihat [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id), 2021).

Maka sangat jelas arus globalisasi yang hadir di Indonesia dengan keadaan masyarakat yang beragam menghadirkan sebuah kesiapan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Sebab arus globalisasi bukan hanya membawa nilai-nilai positif kepada masyarakat, justru tidak memungkiri keadaan sebaliknya hal-hal negatif pun ikut terseret didalamnya hingga menghadirkan perpecahan, perselisihan, dan ketidakharmonisan dalam masyarakat (Danurahman J. & Prasetyo D. & Hermawan H., 2021). Tentunya, ada urgensi tersendiri dalam kajian penelitian ini yang akan membahas tentang bagaimana komunikasi yang terjadi antara dua kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang.



### C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dalam rangka mencari uraian mengenai suatu keadaan dengan pendekatan penelitian secara *grounded research*. Seperti yang ditulis oleh Abdurrahman dalam buku *Penelitian Agama ; Masalah dan Pemikiran*, *grounded research* merupakan suatu pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti tanpa terikat atau bertujuan membuktikan benar atau tidaknya suatu teori yang sudah dikemukakan oleh para ahli (Sumardi & Dkk, 1982). Metode kualitatif selalu menekankan pada persepsi dan pengalaman partisipan, dan cara mereka memaknai hidup. Karena itu, informan ditempatkan sebagai subjek (emik) yang akan diteliti sebagai sumber pengetahuan (Creswell, 2010).

Menurut Abdurrahman, dalam pelaksanaan *grounded research* ada teknik yang dikenal dengan istilah *constant comparison*, yaitu usaha peneliti selama di lapangan menumbuhkan kategori dan konsep lapangan berdasarkan realitas yang diperoleh sebagai bangunan analisis. Maka, metode ini tidak menggunakan petunjuk *random sampling* yang lazim digunakan dalam penelitian struktural kuantitatif, mengingat akan banyak pengembangan analisa yang muncul di lapangan.

Pengumpulan data dimulai dari pengamatan terlibat sebagai upaya memahami sendiri peristiwa yang menjadi fokus penelitian, seperti yang dikatakan oleh Jorgensen “...*direct observation is the primary method of gathering information* (Jorgensen, 1989). Selanjutnya dilanjutkan dengan wawancara, baik tanpa rencana (*unstandardized interview*) namun mengarah (*focused interview*). Upaya ini diharapkan akan memberi data informasi dan pandangan praktik keagamaan yang moderat selama ini di tengah masyarakat Kepulauan Banyak. Sebagai bentuk konsistensi penelitian, maka peneliti menetap bersama masyarakat selama beberapa bulan dalam rangka menyelami keadaan sesungguhnya. Peneliti merupakan *outsider* dan orang baru di tengah masyarakat Kepulauan Banyak. Maka, langkah pertama adalah mencari beberapa informan pangkal (*key informan*). Informan adalah subjek utama sumber pengetahuan dalam penelitian kualitatif. Spradley memberi dua pertimbangan dalam pemilihan *key informan* ;

orang tempatan yang memahami dan memiliki pengalaman matang. Selanjutnya, mampu memberikan analisis dan interpretasi dari perspektif *folk theory* (konsep tempatan) (Spradley, 1997). Dalam hal ini, informan kunci merujuk pada kepala desa, pemuka agama, dan pemuka masyarakat di lokasi penelitian.

Selain itu, dalam proses pengumpulan data, studi kepustakaan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah penelitian. Sebelum mengadakan penelitian dan selama menyelami peristiwa di tengah masyarakat, peneliti terus membaca, terutama budaya dari daerah yang akan diteliti. Dari studi pustaka, peneliti bisa mendapatkan pemahaman kebudayaan setempat, sejarah Muhammadiyah dan Pesantren di Indonesia, serta gambaran Islam moderat yang selama ini menjadi fokus dari kerja pengembangan wajah Islam di Indonesia.

Tahapan terakhir adalah analisis data berdasar metode kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Analisis data harus dilakukan dengan keseriusan, kejelian, dan kehati-hatian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis harus berlangsung secara serempak (*simultaneously*) (Mariam 1998, Marshall dan Rossman 1989 dalam Creswell, 2010). Analisis data telah dimulai sejak proses penelitian berlangsung, di mana peneliti harus cerdas, kreatif dan peka memilih dan memilah data mana yang penting atau tidak.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

##### **Singkil, Sejarah dan Masyarakatnya**

Secara geografis, Kabupaten Aceh Singkil terletak pada posisi 2°02'-2°27'30" Lintang Utara dan 97°04'-97°45'00" Bujur Timur. Adapun batas wilayah Kabupaten Singkil adalah sebagai berikut; Sebelah Utara berbatasan dengan Kotamadya Subulussalam, sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan (Katalog BPS: 1102001. 1102, 2015).

Melihat letaknya yang strategis berdasar batas wilayah, kawasan Singkil sejak lama telah menjadi pintu migrasi penduduk lintas etnik. Kehadiran penduduk lintas etnis, terutama disebabkan oleh dorongan mata pencaharian. Ada

yang datang sendiri, dan didatangkan oleh pihak perusahaan perkebunan seiring meningkatnya kebutuhan buruh. Dari data statistik, berdasar sensus penduduk tahun 2020, penduduk kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2020 berjumlah 126.514 jiwa, dengan jumlah penduduk laki - laki berjumlah 63.978 jiwa dan perempuan berjumlah 62.536 jiwa. Dari 12 kecamatan di kabupaten Aceh Singkil, kecamatan Gunung Meriah memiliki populasi penduduk terbanyak dengan jumlah 39.557 jiwa dan kecamatan Kuala Baru memiliki populasi penduduk paling sedikit yaitu 1.305 jiwa. Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk, Pulau Banyak merupakan kecamatan dengan tingkat populasi penduduk terpadat yaitu 303,73 jiwa/km<sup>2</sup>, sedangkan Pulau Banyak Barat merupakan kecamatan terjarang penduduknya yaitu 11,05 jiwa/km<sup>2</sup>.

Nama Singkil sangat populer dalam perjalanan sejarah Aceh, terutama karena keberadaan dua intelektual yang berafiliasi pada negeri Singkil ; Hamzah Fansuri dan Syaikh Abdurrauf as Singkili. Dari penuturan beberapa informan di Singkil, kedua tokoh ini diklaim berasal dari Singkel. Mereka berasal dari Kampung Suro (bukan Kecamatan Suro). Abdurrauf sendiri diperkirakan lahir pada tahun 1615, lalu menuntuk ilmu ke Timur Tengah (Mekkah, Madinah dan Yaman) selama hampir dua dekade. Ia merupakan anak daripada pedagang (penyebar Islam) yang datang dari Timur Tengah, kemudian menikah dengan penduduk setempat (Sufi, dkk, 2003 : 46). Kampung Suro dulunya merupakan pemukiman para saudagar, pedagang luar, lokasinya dekat pelabuhan Singkel dan Barus. Syukri Yeoh, seorang peneliti tarekat Syattariah mengklaim jika Abdurrauf memiliki marga sebagaimana lazimnya penduduk Singkil lainnya, yaitu Limbong.

Hamzah Fansuri dan Abdurrauf (Qadhi Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-17 M), keduanya terlibat aktif di atas panggung kekuasaan Kerajaan Aceh kala itu. Seperti diungkap oleh Azra, dua intelektual ini paling berpengaruh dalam perkembangan Islam di Nusantara, khususnya dalam sejarah dan peradaban Islam di Aceh (Azra, 1999). Narasi sejarah Islam Nusantara, cenderung mengaitkan Singkel dengan salah satu titik sejarah penting, terutama motor pengembangan Islam dan kebudayaan Melayu Jawi khususnya.

Berdasar dokumen-dokumen sejarah pra kolonial, pengaruh Kerajaan Aceh dan Minangkabau melekat kuat dengan wilayah pantai barat Sumatra. Jejak arkeologis berdasar hasil temuan di Singkel dan Barus, hingga awal abad ke-19 M, eksistensi dan Pemukiman orang Aceh serta Minangkabau masih kerap ditemui di sana. Catatan lama Nusantara pun menyebutkan jika pengaruh Aceh meliputi kerajaan-kerajaan di Semenanjung Malaya, seperti Kedah, Perak, Pahang, dan Johor. Bahkan, sebelum tahun 1603, Aceh mengambil ladanya dari Pattani, Kedah, Pedir, Indragiri, dan Jambi. Ekspansi Aceh saat itu berhasil menguasai perdagangan Pantai Barat Sumatra dan mencakup Tiku, Pariaman, dan Bengkulu (lihat Kartodirjo, 1987: 66-67).

Narasi pengaruh Aceh yang begitu kental, diperkuat oleh cerita penduduk tempatan, mereka yang telah berusia lanjut- saat saya wawancarai, mengakui sebagian besar penduduk Singkil dulunya lumrah berbahasa Aceh. Jejak pemukiman Aceh di Barus dan Singkel juga diakui oleh beberapa dokumen sejarah lama, seperti yang disebutkan dalam disertasi Ida Liana Tanjung, *"Antara Orang Pasisir dan Orang Batak di Tapanuli: Kesadaran Identitas Etnik di Barus dan Sibolga, 1842-1980-an"* (2016), bahwa memang hingga akhir abad ke-19 masih terdapat pemukiman Aceh dan Minang di Barus. Selain itu, catatan-catatan sejarah Nias yang saya kumpulkan ketika berkunjung ke Nias, juga mengakui adanya eksistensi pemukiman orang Aceh dan Minang di sepanjang pesisir Nias (dari Gunung Sitoli hingga Teluk Dalam). Ketiganya (Barus, Singkel, dan Nias) merupakan bandar pelabuhan penting pantai Barat Sumatra abad ke-16, sebelum Sibolga dibangun kolonial Belanda saat membina residen Tapanuli, sebagai upaya memukul mundur kekuatan Aceh.

Islam dan Aceh berperan vital dalam jejak sejarah Singkel. Dua identitas ini memungkinkan intelektual sekaliber Hamzah Fansuri dan Abdurrauf diakui, dan diterima secara baik oleh Kerajaan Aceh dalam lingkungan kekuasaan. Selain modal sosial sebagai intelektual, tampaknya ada pengaruh genealogi yang menghantarkan mereka mendapat posisi-posisi penting dalam Kerajaan Aceh. Dugaan saya, keduanya keturunan Aceh. Keberadaan Singkil di bawah pengaruh Kerajaan Aceh dapat dilihat pula dari keberadaan cap penguasanya. Saya bertemu Annabel The Gallop di Jogjakarta, seorang kurator museum yang begitu terkenal

dalam studi sejarah di Asia Tenggara. ia mengirim saya dokumen tentang cap penguasa Singkel. Atas izin Annabel, saya diperkenankan menggunakan dokumen tersebut untuk kebutuhan akademik. Salah satu cap yang ada dalam dokumen Annabel adalah mengenai cap Raja Lebai Dhapa (Negeri Singkel). Penduduk tempatan Singkel menyebut Lebai Dapa/Lebai Dapha sebagai gelar raja bukan nama asli. Dalam cap raja Lebai Dapa yang dikirim Annabel untuk saya, di sana tertulis keterangan, *Lebai Dapa (1814), Raja of Singkil; also succeeded his brother Datuk Si Ruyung as Raja of Terumun, important pepper trader* (Dobbin 1987 : 167) yang menerangkan posisi wakil Raja Aceh Lebai Dapa Negeri Singkil.

Sejak tahun 1870, tiga tahun sebelum menyatakan perang dengan Aceh, Belanda telah memasuki periode kapitalisme modern, pascarevolusi industri. Pada periode ini pula Belanda berada di puncak ekonomi kapitalisme, karena hampir semua rempah-rempah yang akan masuk ke Eropa dimonopoli oleh Negara ini. Periode tahun 1850-1870 juga ditandai dengan pesatnya kemajuan perdagangan Eropa, dan Belanda juga mendapatkan keuntungan dari perkembangan ini. Politik “pintu terbuka” di Hindia Belanda, dan perkembangan perusahaan-perusahaan swasta mengakibatkan mereka bergerak pencarian hasil daerah ke wilayah asing (Kartodirdjo, 1967). Apalagi, sejak Tahun 1824 pasca Traktat London, Belanda memiliki hak penuh penguasaan wilayah Hindia Belanda saat itu setelah proses tukar guling dengan Britania Inggris.

Memahami kondisi Singkil di era kolonial, hanya ada beberapa catatan yang pernah mendeskripsikan wilayah perbatasan Aceh ini pada masa tersebut. Diantaranya, buku *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imperialisme di Sumatra Utara* (1991). Selain itu, ada dua tulisan lain yang cukup membantu memahami Singkel di era kolonial ; *Pertama*, tulisan dan kajian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni, dkk (2003) dalam bundel “*Laporan Budaya Masyarakat Suku Bangsa Singkil*,” yang diterbitkan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh. *Kedua*, tulisan Sudirman (2009), peneliti Balai Pengkajian dan Nilai Budaya-Aceh yang dipublikasi di laman blognya mengenai *Sejarah Maritim Singkil*.

Upaya Belanda menguasai beberapa wilayah seperti Singkil adalah strategi awal untuk menguasai Aceh. Mereka terlebih dahulu melalap kawasan yang pernah ditundukkan Aceh, termasuk perbatasan Aceh., diantaranya Singkil.

Beberapa Bandar yang dulunya diduduki Kerajaan Aceh, mulai direbut Belanda. Kondisi ini ditandai dengan dibangunnya Residen Tapanuli, yang dimasukkan ke dalam wilayah administrasi *Nordelijke Afdeeling* di bawah kekuasaan Gubernur Pantai Barat Sumatra (*Gouverneur Sumatra's Westkust*) sejak tahun 1937, dan Singkel yang sebelumnya berada di bawah kontrol Kerajaan Aceh dianeksasi dalam daftar residen ini, setengah abad sebelum Belanda mendeklarasikan perang dengan Kerajaan Aceh pada tahun 1873. Residen Tapanuli mencapai puncak perluasan wilayah pada tahun 1842 dengan didirikannya ibukota residen di Sibolga (Tanjung, 2016 dalam Al-Fairusy, 2016).

Dua hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, beberapa pemuda Singkil mengumandangkan proklamasi yang sama di kawasan pasar Singkil sebagai bentuk dukungan atas berdirinya negara bangsa Indonesia. Berdasar informasi masyarakat tempatan, aksi mereka diabadikan dengan pendirian tugu proklamasi di kawasan pasar Singkil. Singkil selanjutnya dimasukkan dalam teritorial Provinsi Aceh, sebagai salah satu kabupaten perbatasan yang langsung berdampingan dengan Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Singkel dan Singkil (ejaan setelah kawasan ini menjadi administrasi kabupaten), selanjutnya ditambah kata Aceh di depannya. Penggunaan Aceh guna mempertegas kabupaten ini bagian dari teritorial dan wilayah geopolitik Provinsi Aceh. Meskipun, secara identitas budaya, masyarakat Singkel berbeda dengan Aceh dalam konteks etnis. Pada saat meletusnya gerakan DI/TII tahun 1953 di Aceh, sebagai peristiwa politik pada awal kemerdekaan Indonesia, dan dilanjutkan dengan konflik Gerakan Aceh Merdeka yang mulai berlangsung sejak tahun 1976, Kabupaten Singkil ikut merasakan dampaknya. Meskipun, suasana di Singkil tidak separah yang dialami masyarakat Aceh pada umumnya. Salah satu dampak kehadiran DI/TII di Singkil adalah mengentalkan identitas keislaman bagi warga Muslim Singkil, bahkan cenderung eksklusif. Adapun eskalasi konflik Gerakan Aceh Merdeka, Singkil selanjutnya diintegrasikan dalam wacana keacehan dan Syariat Islam sebagaimana yang kini menstruktur dalam masyarakat Aceh. Dua peristiwa ini, menyumbang persoalan identitas di Singkil kemudian hari.

## **Munculnya Segregasi “Kita” dan “Mereka” dalam Konflik Agama di Singkil**

Puncak gesekan konflik agama di Singkil terjadi pada tanggal 13 Oktober 2015. Konflik ini menyita perhatian luas masyarakat, hingga ke ranah nasional dan internasional. Kondisi ini menunjukkan kerapuhan nilai toleransi masyarakat di perbatasan Aceh dalam beragama. Konflik di Singkil merupakan peristiwa sejarah yang berlanjut, dimulai sejak tahun 1979, yang ditengarai akibat adanya rencana pembangunan rumah ibadah umat Nasrani yaitu Gereja Tuhan Indonesia (GTI) di Singkil. Wacana kian mengental seiring beredarnya rumor kristenisasi di Aceh Singkil (Hartani dan Nulhaqim, 2020).

Keberadaan Islam dan sejarah Singkil, berkembang menjadi identitas tersendiri bagi masyarakatnya setempat, terutama penduduk Singkil yang (memilih) beragama Islam. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Singkil awalnya merupakan sebuah wilayah yang berafiliasi pada komposisi penduduk lintas-etnis dan agama. Sekilas, di permukaan tampak masyarakat hidup berdampingan dan rukun dalam identitas yang sama sebagai “Masyarakat Singkil” dan “Orang Singkil.” Namun, jika diselami, akan muncul riak-riak benturan pengakuan jati diri berdasar identitas etnis dan agama. Apalagi, dalam satu dekade terakhir, kemunculan beberapa perkumpulan yang memboncengi identitas agama dan etnis yang mengatas nama “penyelamat suku Singkil” kian kencang. Wacana identitas, terutama atas nama agama menguat di tengah masyarakat heterogen Singkil.

Agama sebagai identitas memang menjadi arena kontestasi bagi manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI), agama dipahami sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang Mahakuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Menurut Radcliffe Brown dalam Nadia (2017) agama dimanapun merupakan ekspresi suatu bentuk ketergantungan di luar diri kita sendiri, yakni kekuatan yang dapat kita katakan sebagai kekuatan spiritual atau kekuatan moral. Sebagai bentuk penegasan pada agama, di tengah masyarakat Singkil adakalanya muncul spirit yang diungkapkan seperti “*Menjadi Singkil, menjadi Aceh, menjadi Aceh, menjadi Islam*” merupakan ungkapan

penegasan pada jati diri Orang Singkil yang sudah menganut Islam dan berupaya untuk menarik kelompok lain yang hidup di Singkil memahami ungkapan ini. Islam telah berpengaruh kuat dalam kebudayaan Singkil. Ungkapan ini juga berlaku di tengah masyarakat Aceh (Prasetyo, 2009 : 16). Kondisi ini kian diperkokoh dengan keberadaan Singkil bagian dari Aceh, yang dipandang sebagai kawasan Islam.

Identitas atas nama agama dapat ditemui dengan kontras dari klasifikasi diri yang diungkap oleh penduduk Singkil saat penelitian sedang dilaksanakan, antara “kita” dan “mereka.” “Kita” untuk mengidentifikasi diri sebagai Muslim, dan “mereka” adalah penduduk Singkil yang beragama selain Islam (Kristen dan anisme Parmalim). Klasifikasi ini berlaku tidak hanya di kawasan hulu, pun di kawasan Singkil Pesisir antara Muslim dan Non Muslim juga dibedakan dengan istilah “kita” dan “mereka.” Sebagaimana diketahui, di kawasan Pesisir Singkil, penduduk Non Muslim umumnya adalah penduduk Nias yang bermigrasi ke kawasan ini, khususnya di Kecamatan Pulau Banyak Barat sejak era kolonial. Adapun di kawasan daratan, penduduk Non Muslim, umumnya adalah etnis Pakpak yang masih bertahan dengan agama leluhurnya (Parmalim) dan yang telah memeluk Kristen sejak era kolonial.

Munculnya “kita” dan “mereka” adalah wujud dari *silent conflict* yang berlangsung dalam suasana interaksi sosial, seakan semua tampak harmoni. Padahal, segregasi identitas menguat. Apalagi, sejak wacana Syariat Islam kian kokoh di Aceh, kesadaran dan eksklusivisme masyarakat Muslim Singkil kian mengental. Mereka kerap merasa waspada dengan pertumbuhan populasi penduduk Non Muslim di sekitar mereka. Pendirian rumah ibadah yang ditengarai tanpa izin dimaknai sebagai ancaman identitas, karena itu harus selalu diwaspadai.

Pun demikian, identitas agama juga ditampilkan di rumah tempat tinggal sebagian penduduk Singkil, terutama mereka yang hidup berdampingan antara Muslim dan Non Muslim, terutama di Kecamatan Gunung Meriah, Simpang Kanan, Suro dan Danau Paris. Rumah-rumah penduduk Muslim diberi penanda stiker “*Assalamualaikum*” dengan aksara Arab. Adapun rumah penduduk Non Muslim diberi tanda “*Syaloom.*”



Konflik agama yang terjadi sejak tahun 1979, dan terus berlangsung hingga tahun 2015 secara berkala, menyumbang pembentukan identitas “kita” dan “mereka” dalam merekonstruksi identitas masyarakat Singkil kemudian hari. Konflik tersebut telah memperuncing jarak antara masyarakat Singkil Muslim dan Non Muslim. Kondisi ini tak hanya memperkuat makna Pakpak bagian dari identitas Kristen yang mulai mengental, pun menjadi alasan jika Muslim hulu tidak lagi mau diidentifikasi sebagai sub-etnis Pakpak yang dipandang berkonotasi Non Muslim.

Segregasi dan eksklusivisme antara “kita” dan “mereka” tak hanya terjadi di tengah masyarakat yang hidup berdampingan, namun berbeda agama. Dalam konteks kehidupan mahasiswa di Banda Aceh pun, segregasi ini muncul. Misalnya, cerita seorang mahasiswi di yang tinggal di asrama Putri Singkil, di kawasan Lampriet, Banda Aceh. Ia tinggal sekamar dengan beberapa temannya dari Singkil yang beragama Kristen. Ia merasa risih untuk menggunakan kamar mandi bersama, dengan alasan perbedaan identitas dan merasa kurang nyaman secara kesucian agama Islam. Kondisi ini diutarakan saat saya menggali informasi keberadaan mahasiswa Non Muslim dari Singkil yang sedang menempuh studi di Banda Aceh. Bagi mahasiswi ini, “mereka” juga dipandang berbeda, dan dianggap sedikit “kumuh.”

Beberapa studi sebelumnya di Singkil, mencatat jika tak asing dengan istilah “mereka” dan “kita” dari para informan untuk membedakan jati diri Muslim dan Kristen. Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Muji Mulia (Dosen UIN Ar-Raniry) dalam laporan penelitian yang tidak dipublikasi, *Akar Konflik: Pemetaan dan Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama di Daerah Perbatasan Aceh Singkil* (2020), juga melihat klasifikasi identitas diri berdasar dua kata ini.

### **Ruang Komunikasi Lintas Budaya dalam Konflik Singkil**

Di Singkil terdapat pasar tradisional yang disebut *pajak* dan *onan*. *Pajak* merupakan pasar tradisional yang dibuka setiap hari. Adapun *onan* adalah pasar tradisional mingguan. Biasanya dilangsungkan bergilir setiap kecamatan di Singkil selama seminggu sekali. Lokasinya tetap di pasar tradisional yang sama. Pasar

tradisional dapat dimaknai sebagai ruang publik dan pusat berlangsungnya komunikasi lintas budaya. Di sini, *pajak* maupun *onan*, akan mudah ditemui masyarakat Singkil lintas agama berbaur. Apalagi saat berlangsungnya *onan*, pengunjung pasar lebih ramai dibanding *pajak*, selain mungkin karena waktunya seminggu sekali, juga ikut diramaikan oleh pedagang dari luar Singkil, terutama dari Sumatera Utara, yang juga beridentitas beragam, tak hanya Islam. Keberadaan pasar tradisional di Singkil yang melibatkan penduduk setempat dari lintas agama dan etnis telah berlangsung lama. Hampir tak ada dampak konflik agama di Singkil terhadap keberlangsungan pasar tradisional di sini.

Kedatangan para pedagang dari luar Singkil saban minggu, terutama dari kabupaten Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan Dairi disebabkan letak Singkil yang berdampingan dengan provinsi tetangga (BPS Aceh Singkil, 2014). Meskipun, budaya provinsi tetangga kerap mempengaruhi cara hidup masyarakat Singkil secara bahasa dan dialek. Namun, secara administrasi Aceh Singkil tetap berada masih dalam lingkaran Provinsi Aceh. Segala kebijakan yang diproduksi di Aceh, turut mengalir ke Singkil sebagai kawasan perbatasan, termasuk pelaksanaan Syariat Islam yang dimaknai sebagai persoalan identitas kemudian hari. Kondisi inilah yang membenturkan arus struktural dan kultural di Singkil.

Menurut penelitian dari Haltani dan Nulhaqim (2020) secara historis pada tahun 1979 sebagai babak awal konflik agama di Aceh Singkil yaitu disebabkan oleh masalah pembangunan Gereja di Gunung Meriah, kemudian dari pembangunan ini diprotes oleh umat muslim sehingga terjadi penjanjian 11 Juli dan ikrar bersama 13 Oktober 1997. Dilanjutkan pada tahun 1995 terjadi pembakaran Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi (GKPPD) namun berhasil dipadamkan oleh warga. Selanjutnya pada tahun 1998 terjadi pembakaran sebagian GKPPD oleh orang yang tidak dikenal. Hal ini masih berlanjut pada tahun 2001 yaitu terjadi pemboikotan sepuluh Gereja akibat warga tidak setuju pendirian Gereja.

Sebagaimana diterangkan dalam studi Soehadha, jika pengakuan terhadap agama sampai saat ini lebih menunjukkan nuansa politisnya, daripada upaya menjamin hak-hak secara penuh bagi semua orang memeluk agama secara

beragam. Apalagi, antara Islam dan Kristen memang memiliki gerakan misi keagamaan. Mereka cenderung mengajak dan mengupayakan penganut religi lokal dapat mengkonversi pada keyakinan keduanya (Soehadha, 2014 : 18-19). Konversi ini selanjutnya akan melahirkan segmentasi bagi kedua pemeluknya. Sebagaimana di Singkil, penduduk yang menganut agama Islam menyebut diri “kita” dan Kristiani dengan istilah “mereka.”Islam di Aceh dan Singkil memang telah mengalami perjalanan sejarah panjang. Disusul Kristiani pada era kolonial.

Konflik agama seperti yang terjadi di Singkil, akan memberikan bekas di lingkungan masyarakat yang begitu mendalam karena menyebabkan kerusakan rumah ibadah, dan mencabik toleransi umat beragama. Apalagi, konflik tahun 2015 yang menyebabkan kematian salah seorang masyarakat Singkil. Kondisi ini telah mendorong munculnya berbagai reaksi yang berbeda dari setiap individu maupun kelompok (setriotip). Seperti dikatakan Aritonang (2021) Akibat dari kejadian pembakaran Gereja serta kerusuhan yang terjadi membuat masyarakat ketakutan dan bahkan masyarakat harus mengungsi. Selain itu konflik Aceh Singkil tidak hanya menciptakan ketegangan sosial dan rasa curiga antarumat beragama, tetapi jauh dari pada keadaan itu juga menimbulkan sentimen di tengah masyarakat (Fairusy, 2015).

Namun, di tengah upaya mengkonsolidasi masyarakat Singkil yang terus dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, ada ruang kultural yang dapat dimanfaatkan oleh aktor budaya. Keberadaan ruang publik seperti pasar tradisional di Singkil, sejatinya melahirkan ruang dialog yang bersifat kultural. Arena komunikasi lintas budaya berlangsung dengan cukup elegan. Kondisi ini juga mengisyaratkan, jika konflik agama di Singkil dapat diredam dengan mengedepankan komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya tidak dibentuk dengan cara struktural. Melainkan, hadir secara natural dan kultural. Di Singkil, komunikasi lintas budaya selain dapat ditemui di ruang publik seperti pasar dan tempat berkumpul masyarakat Singkil saat menggelar hajatan. Berkembang cerita, bagaimana orang Singkil lintas-agama mampu membangun relasi intim saat pesta hajatan berlangsung. Cerita dari Kecamatan Simpang Kanan misalnya, sebagai salah satu kecamatan yang dihuni oleh masyarakat Singkil lintas

agama, mereka kerap menghargai tetangga yang beda agama apabila pesta hajatan diselenggarakan.

Komunikasi lintas agama dan budaya, berbeda dengan komunikasi antar-budaya. Meskipun dalam kajian studi ilmu komunikasi kedua fokus diatas memiliki hilir yang sama, sebab keduanya membahas latar belakang individu atau kelompok yang berbeda sehingga mengukir interaksi kehidupannya. Budaya harus dilihat sebagai cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Ada banyak definisi kebudayaan. Triandis dalam bukunya Samovar dkk (2010:27) menulis,

“...Kebudayaan merupakan elemen subjektif dan objektif yang dibuat manusia, yang di masa lalu meningkatkan kemungkinan untuk bertahan hidup dan berakibat dalam kepuasan pelaku dalam ceruk ekologis, dan demikian tersebar di antara mereka yang dapat berkomunikasi satu sama lainnya, karena mereka mempunyai kesamaan bahasa dan mereka hidup dalam waktu dan tempat yang sama”.

Pertarungan pembentukan budaya kian kompleks dimana ada faktor-faktor lain yang cukup andil dalam pembentukan budaya dalam masyarakat diikuti dengan suatu fenomena yang ada sedang terjadi, salah satunya yaitu berkaitan dengan kekuasaan. Seperti dikatakan Kusniati dan Sitanggang (2016) dimana budaya juga mampu dipahat dari berbagai unsur yang ada dan cukup rumit diantaranya adalah sistem agama, politik, dan adat istiadat serta segala yang terkandung di dalam masyarakat. Komunikasi lintas budaya dalam konteks Singkil.

Budaya biasanya akan menyesuaikan diri sesuai perubahan sosial. Budaya ikut terbentuk dari berbagai kemajuan teknologi, serta berbagai arus globalisasi yang hadir secara silang dari satu negara ke negara lain yang pada akhirnya membentuk suatu kebiasaan dalam kehidupan seseorang maupun kelompok. Sebagaimana menurut Malinowski dalam Nahak (2019), budaya yang lebih tinggi dan aktif cenderung akan mempengaruhi budaya yang lebih rendah dan pasif melalui kontak budaya. Konflik di Singkil muncul akibat dominasi prasangka dan politik atas nama agama di Singkil. Karena itu, perlu dibangun budaya komunikasi lintas-agama guna meredam konflik Singkil. Ruang seperti pasar tradisional dan hajatan, akan berfungsi sebagai budaya baru dalam rangka konsolidasi masyarakat

Singkil. Memang, dalam konteks pasar tradisional di Singkil, pola komunikasi budaya terbentuk dari relasi ekonomi.

### **E. Kesimpulan**

Konflik di Singkil hingga sekarang masih ibarat api dalam sekam. Dapat membunyah kapan saja. Sejatinya, agama di Indonesia diharapkan mampu menjadi alat yang menjembatani perbedaan dan membangun mental toleransi. Apalagi, Kemenag sedang mendorong moderasi beragama, yang menjadi bagian dari kerja keras bangsa ini dalam mengintegrasikan masyarakat Muslim khususnya di Indonesia. Singkil sebagai salah satu wilayah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara, sejatinya menjadi contoh yang baik (*lesson learn*) bagaimana seharusnya masyarakat lintas iman dapat hidup berdampingan. Identitas sebagai *orang Singkil* yang satu, justru terdapat di ruang publik seperti pasar tradisional dan arena hajatan.

Penelitian yang dilakukan selama hampir beberapa bulan ini, dalam rangka memahami kehidupan masyarakat lintas agama di Singkil, menunjukkan identitas kesukuan tak selamanya menyatu, justru dapat dikoyak oleh identitas tandingan-agama. Sikap politik yang memecah belah masyarakat Singkil beda agama, sejatinya dapat diredam dengan penguatan komunikasi lintas budaya. Kondisi ini dapat ditemukan di pasar tradisional Singkil, dan arena hajatan pesta perkawinan. Di mana, kelompok masyarakat beda agama justru dapat membangun relasi intim, dengan mengedepankan komunikasi lintas budaya.

Studi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran penting, bahwa komunikasi lintas budaya yang muncul di ruang public seperti pasar tradisional, dapat hidup di tengah masyarakat Singkil. Di pasar tradisional, ego kelompok dapat diredam dan perasaan senasib sebagai identitas yang sama-Orang Singkil diangkat ke permukaan. Tentunya, penelitian ini masih dapat dilanjutkan untuk memahami lebih dalam mengenai gambaran kehidupan masyarakat Singkil yang dibayangi oleh ancaman konflik atas nama agama, dan dapat membunyah kapan saja di Kabupaten Singkil. Kabupaten perbatasan yang jauh dari kontrol pusat pemerintahan Provinsi Aceh.

## Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para informan di Kabupaten Aceh Singkil, FKUB Aceh Singkil, dan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membiayai penelitian ini.

## Daftar Pustaka

- Abdul Djamal Soamole. (1982). *Agama Suatu Teori Sekuler (terj)* . Erlangga.
- Azra, A. (1999). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Mizan.
- Bachtiar Effendy. (2001). *Isu- Isu Politik Kontemporer*. Ciputat Press.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design ; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)* (Ketiga). Pustaka Pelajar.
- Danurahman J. & Prasetyo D. & Hermawan H. (2021). Kajian Pendidikan Multikultural di Era Digital. *Kalacakra, 2*.
- Fairusy, M. al. (n.d.). "MENJADI SINGKEL MENJADI ACEH, MENJADI ACEH MENJADI ISLAM" (Membaca Identitas Masyarakat Majemuk Dan Refleksi Konflik Agama Di Wilayah Perbatasan-Aceh Singkel). *Sosiologi USK, Nomor 1, 9*(Sosial Budaya), 17–33.
- Hendropuspito, OC. (1984). *Sosiologi Agama*. BPK Gunung Mulia.
- James Norman Dalrymple Anderson. (1991). *Hukum Islam di Dunia Modern (Terj.)*. C.V. Amar press.
- Jorgensen, D. L. (1989). *Participant Observation ; A Methodology for Human Studies*. SAGE Publications.
- Katalog BPS : 1102001. 1102. (2015). *Aceh Singkil dalam Angka 2015* . BPS.
- Kurniawan D. (2018). Komunikasi Model Laswell Dan Stimulus-Organism-Response Dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan. *Jurnal Komunikasi Pendidikan , 2*.
- Maswadi Rauf. (2000). *Konsensus Politik* . Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Paul Rosyadi. (1986). *Sosiologi Agama (terj)*. Aksara Persad.
- Pruit Dean, R. J. R. (2004). *Teori Konflik Sosial* . Pustaka Pelajar.
- Ramadhanita Mustika Sari. (2011). *Jaring Pengaman Pencegah Konflik:Kasus Masyarakat OKU Timur*. Universitas Islam Negeri.
- Rex, M. G. and J. (1997). *The Ethnicity Reader ; Nationalism, Multiculturalism and Migration*. Polity Press.

Robert N. Bellah. (2000). *Beyond Belief: Esai-esai tentang Agama di Dunia Modern (terj)*. Paramadina.

Robert N Bellah Beyond Belief. (1994). *Essay on Religion in a Post Traditional World*. University of Chicago Press.

Said Agil Husin Al Munawwar. (2005). *Fikih Hubungan Antar Agama*. Ciputat Press,.

Spradley, J. P. (1997). *Metode Etnografi (terjemahan)*. PT. Gramedia.

Sumardi, M., & Dkk. (1982). *Penelitian Agama : Masalah dan Pemikiran*. PT. Sinar Agape Press.

Syamsuddin Abdullah. (1997). *Agama dan Masyarakat*. Logos Wacana Ilmu.